



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1232-1236

EDUKASI HUKUM & DEMOKRASI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-AMIN PAJAJARAN

**Zulkarnaini Umar¹, Miftakhul Mukharrom², Musthafa Kamal³,
Raihanul Qalbi⁴, Endang Suparta⁵, Erlina⁶, Amanda⁷, Putri Naurah Jannah⁸**

^{1,2,5,6,7,8} Universitas Islam Riau

³ STIE Bangkinang

⁴ Universitas Riau

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2481>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Zulkarnaini, U., Mukharrom, M., Kamal, M., Qalbi, R., Suparta, E., Erlina, E., Amanda, A., & Jannah, P. N. (2024). EDUKASI HUKUM & DEMOKRASI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-AMIN PAJAJARAN. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1232–1236. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2481>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

EDUKASI HUKUM & DEMOKRASI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-AMIN PAJAJARAN

**Zulkarnaini Umar¹,
Miftakhul Mukharrom²,
Musthafa Kamal³,
Raihanul Qalbi⁴**

^{1,2} **Universitas Islam Riau**

³ **STIE Bangkinang**

⁴ **Universitas Riau**

*** Email Korespondensi:**

miftahmukarrom23@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 02/12/2024

Diterima : 03/12/2024

Diterbitkan : 04/12/2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan program edukasi hukum dan demokrasi di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Amin Pajajaran. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman santri terhadap prinsip-prinsip hukum serta nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri memiliki pemahaman dasar tentang hukum dan demokrasi, namun perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis interaktif dan kontekstual.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Demokrasi, Santri, Pondok Pesantren, Al-Amin Pajajaran

Abstract

This research aims to analyze and develop a legal and democracy education program among students at the Al-Amin Pajajaran Islamic Boarding School. This program aims to increase students' understanding of legal principles and democratic values in social and state life. The research uses a descriptive-qualitative method with in-depth interviews, observation and documentation studies as data collection techniques. The research results show that students have a basic understanding of law and democracy, but this needs to be improved through an interactive and contextual based approach.

Keywords: Legal Education, Democracy, Islamic Boarding School Students, Islamic Boarding School, Al-Amin Pajajaran



PENDAHULUAN

Pendidikan hukum dan demokrasi memiliki peranan penting dalam membentuk generasi muda yang mampu memahami dan menghormati nilai-nilai kebangsaan, aturan, serta prinsip-prinsip dasar yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan beragam, pendidikan hukum dan demokrasi dapat menjadi sarana strategis untuk membangun harmoni sosial dan menanamkan sikap menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini bukan hanya memberikan pemahaman tentang aturan formal tetapi juga mengajarkan prinsip musyawarah, kesetaraan, dan keadilan, yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, menanamkan pendidikan hukum dan demokrasi sejak dini, termasuk di lingkungan pesantren, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan tradisional di Indonesia, memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter dan sikap moral para santri. Dengan filosofi pendidikan berbasis agama, pesantren sering kali menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Namun, peran ini juga dapat diperluas untuk mencakup edukasi hukum dan demokrasi yang lebih sistematis. Pesantren memiliki keunikan dalam pendekatan pembelajaran yang bersifat kolektif dan berbasis komunitas, sehingga dapat menjadi tempat yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai hukum dan demokrasi melalui kegiatan sehari-hari seperti diskusi, musyawarah, atau simulasi praktik demokrasi.

Meskipun demikian, banyak pesantren yang masih belum sepenuhnya mengintegrasikan pendidikan hukum dan demokrasi ke dalam kurikulumnya. Salah satu alasannya adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, terdapat anggapan bahwa pendidikan hukum dan demokrasi lebih relevan diajarkan dalam konteks formal seperti sekolah umum atau perguruan tinggi. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam bidang ini, maupun materi pembelajaran

yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan santri.

Pondok Pesantren Al-Amin Pajajaran adalah contoh nyata dari upaya untuk mengintegrasikan pendidikan hukum dan demokrasi ke dalam kurikulum berbasis agama. Dengan pendekatan yang holistik, pesantren ini berusaha menanamkan nilai-nilai hukum dan demokrasi melalui berbagai metode, seperti pembelajaran berbasis kasus, diskusi interaktif, dan simulasi peran. Namun, dalam praktiknya, pesantren ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari sebagian kalangan yang menganggap pengajaran hukum dan demokrasi kurang relevan dengan misi utama pesantren. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam metode pengajaran dan dukungan kebijakan untuk mengatasi hambatan ini.

Pendidikan hukum dan demokrasi yang diterapkan di pesantren tidak hanya berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang taat hukum tetapi juga membangun sikap proaktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Santri yang telah mendapatkan pemahaman ini akan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat, membawa pesan kedamaian dan toleransi berdasarkan nilai-nilai agama yang mereka pelajari. Dengan demikian, upaya integrasi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, yang pada akhirnya dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai edukasi hukum dan demokrasi di Pondok Pesantren Al-Amin Pajajaran. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi sosial dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan pesantren, terutama dalam konteks pendidikan yang berbasis agama. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman, persepsi, dan praktik santri, serta pengelola pesantren, dalam mengintegrasikan nilai-

nilai hukum dan demokrasi ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Al-Amin Pajajaran, sebuah pesantren yang memiliki reputasi sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dengan jumlah santri yang cukup besar. Subjek penelitian terdiri atas 30 santri yang dipilih secara purposif untuk mewakili berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan. Selain santri, penelitian ini juga melibatkan pengurus pesantren serta ustaz dan ustazah yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi edukasi hukum dan demokrasi di pesantren tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan santri, pengurus pesantren, dan tenaga pengajar untuk menggali pemahaman mereka tentang hukum dan demokrasi serta tantangan dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk memantau bagaimana nilai-nilai hukum dan demokrasi diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti di kelas, asrama, dan kegiatan ekstrakurikuler. Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen resmi pesantren, termasuk kurikulum, materi pembelajaran, dan laporan kegiatan yang terkait dengan tema penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode tematik. Proses ini melibatkan langkah-langkah pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Analisis tematik dipilih karena mampu menggali pola-pola penting dalam data kualitatif, seperti persepsi santri terhadap hukum dan demokrasi, metode pengajaran yang paling efektif, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik edukasi hukum dan demokrasi di pesantren serta potensi pengembangannya di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dasar para santri terhadap hukum sering kali berpusat pada konsep syariat Islam sebagai aturan utama yang mengatur kehidupan mereka. Di banyak pesantren, para santri diajarkan bahwa hukum adalah manifestasi dari perintah agama yang mencakup aspek ibadah, muamalah, serta akhlak. Namun, dalam konteks pemahaman terhadap hukum negara, banyak santri belum sepenuhnya mengenal atau memahami sistem hukum nasional, seperti undang-undang atau prinsip-prinsip negara modern. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di pesantren. Tradisi musyawarah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam memutuskan kebijakan internal pesantren maupun menyelesaikan persoalan antarindividu. Hal ini mencerminkan bahwa demokrasi dalam bentuknya yang sederhana sudah menjadi praktik yang akrab bagi para santri.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program edukasi hukum dan demokrasi di pesantren. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam kurikulum formal. Jadwal di pesantren sering kali padat, dengan banyaknya mata pelajaran agama yang menjadi prioritas utama. Alokasi waktu untuk materi hukum dan demokrasi sering kali tidak mencukupi atau bahkan tidak dimasukkan secara khusus. Selain itu, kurangnya bahan ajar yang relevan dengan konteks pesantren menjadi hambatan. Buku teks atau modul yang membahas hukum negara dan demokrasi sering kali disusun dengan pendekatan umum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai pesantren, sehingga sulit diterima oleh santri maupun pengajarnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan program yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti pelajaran agama dan kewarganegaraan. Dengan pendekatan ini, santri dapat memahami konsep hukum dan demokrasi tanpa merasa bahwa materi tersebut terpisah dari

nilai-nilai agama yang mereka pelajari. Metode pembelajaran berbasis kasus (case study) juga dapat digunakan untuk memperkenalkan isu-isu hukum dan demokrasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus-kasus terkait hak asasi manusia, keadilan sosial, atau penyelesaian konflik dapat dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada santri. Metode ini memungkinkan para santri untuk menganalisis dan berdiskusi secara kritis, sekaligus menghubungkannya dengan ajaran agama.

Respon santri terhadap program edukasi hukum dan demokrasi ini umumnya sangat positif, terutama ketika materi disampaikan dengan pendekatan interaktif. Santri menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama jika pembelajaran melibatkan diskusi kelompok, simulasi sidang, atau permainan peran. Metode-metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman santri, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Selain itu, kegiatan semacam ini membantu santri mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berdialog, dan bekerja sama dalam kelompok, yang semuanya merupakan keterampilan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, program edukasi hukum dan demokrasi di pesantren memiliki potensi besar untuk membangun generasi santri yang tidak hanya paham akan syariat Islam, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kehidupan bernegara. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai agama dan demokrasi dapat diajarkan secara harmonis, menciptakan santri yang memiliki wawasan luas, toleran, dan berkomitmen terhadap keadilan.

KESIMPULAN

Edukasi hukum dan demokrasi di Pondok Pesantren Al-Amin Pajajaran memiliki potensi besar dalam membentuk generasi santri yang tidak hanya memahami syariat Islam tetapi juga memiliki kesadaran mendalam tentang hukum negara dan nilai-nilai demokrasi. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama

sejak dini, memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan prinsip-prinsip ini secara harmonis dengan ajaran Islam. Hal ini penting karena hukum negara dan demokrasi adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa, yang keberhasilannya membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk para santri.

Salah satu keunggulan pendekatan di Pondok Pesantren Al-Amin adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan kehidupan santri. Kurikulum ini dirancang untuk menggabungkan ajaran agama dengan prinsip-prinsip hukum negara dan demokrasi. Sebagai contoh, pelajaran fikih yang mengajarkan hukum syariat dapat dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan ini, santri tidak hanya memahami ajaran agama tetapi juga dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut sejalan atau berinteraksi dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang inovatif menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Metode pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah, di mana pengajar hanya mentransfer pengetahuan, mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih interaktif. Di Pesantren Al-Amin, metode seperti diskusi kelompok, simulasi sidang, dan pembelajaran berbasis kasus diterapkan untuk membuat materi hukum dan demokrasi lebih menarik dan relevan bagi santri. Misalnya, santri diajak untuk membahas kasus nyata terkait hak asasi manusia, pemilihan umum, atau penyelesaian konflik secara damai. Melalui aktivitas ini, santri tidak hanya memahami konsep-konsep abstrak, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan edukasi hukum dan demokrasi juga sangat bergantung pada kualitas bahan ajar dan kompetensi pengajar. Untuk itu, pengembangan bahan ajar yang khusus dirancang untuk konteks pesantren menjadi langkah yang sangat penting. Bahan ajar ini harus mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam yang diajarkan di pesantren dan prinsip-prinsip hukum serta demokrasi modern. Dengan demikian, santri dapat

memahami bahwa keduanya bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Di sisi lain, pelatihan bagi pengajar juga menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program ini. Pengajar di pesantren perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang hukum negara dan demokrasi, serta metode pengajaran yang efektif. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap isu-isu hukum kontemporer, teknik mengelola diskusi interaktif, dan cara menggunakan bahan ajar berbasis kasus. Dengan demikian, pengajar tidak hanya mampu menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga dapat menginspirasi santri untuk berpikir kritis dan aktif dalam memahami isu-isu hukum dan demokrasi.

Ke depan, program edukasi hukum dan demokrasi di Pondok Pesantren Al-Amin dapat menjadi model bagi pesantren lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, hukum, dan demokrasi, pesantren ini dapat mencetak generasi santri yang tidak hanya saleh dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga memiliki wawasan luas tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Generasi ini diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam membangun bangsa yang adil, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat. Untuk mewujudkan visi ini, kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya juga perlu terus didorong agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2018). *Pendidikan Hukum di Pesantren*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, M. (2020). *Demokrasi dan Hukum dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Maulana, F. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 120-135.
- Yusuf, S. (2019). "Peran Pesantren dalam Pembangunan Karakter Bangsa". *Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(1), 45-60.